

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

VOL.37 - NO. 2. Juli 2009

ISSN 0126-0731

Majalah Pengembangan Ilmu Sosial

FORUM

KRISIS GLOBAL

**Mengembangkan Sikap Kewirausahaan (Entrepreneurship)
Sebagai Modal Dasar Dalam Menghadapi Krisis Global**

Krisis Ekonomi Global Di Tengah Krisis Lingkungan

**Dampak Krisis Global Terhadap Prospek Pemulihan
Perekonomian Indonesia**

Krisis Kekuasaan Negara di balik Privatisasi Air

Tantangan Jurnalis Di Era Globalisasi Informasi

Evolusi Peradaban Komunikasi Manusia

**Peta Suara DPRD Jawa Tengah Dari Pemilu ke Pemilu
(Voting Map of The Central Java Local Parliament Election to
Election)**

Gizi Buruk, Ketahanan pangan dan Revitalisasi Pertanian

DAFTAR ISI :



Pengantar	i
Reni Shinta Dewi Mengembangkan Sikap Kewirausahaan (Entrepreneurship) Sebagai Modal Dasar Dalam Menghadapi Krisis Global	1
Supratiwi Krisis Ekonomi Global Di Tengah Krisis Lingkungan	6
Sulistiyowati Dampak Krisis Global Terhadap Prospek Pemulihan Perekonomian Indonesia	11
Dzunuwanus Ghulam Manar Krisis Kekuasaan Negara di balik Privatisasi Air	15
Nurul Hasfi Tantangan Jurnalis Di Era Globalisasi Informasi	21
Joyo Nur Suryanto Gono. Evolusi Peradaban Komunikasi Manusia	26
Ari Pradhanawati Peta Suara DPRD Jawa Tengah Dari Pemilu ke Pemilu (Voting Map of The Central Java Local Parliament Election to Election)	34
Puji Astuti Gizi Buruk, Ketahanan pangan dan Revitalisasi Pertanian	40

Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro - Terbit Pertama kali bulan Februari 1972 ; **Penanggung Jawab :** Drs. Warsito, SU - Dra. Sri Widowati H, MS - Drs. Agus Hermani. DS, MM Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin ; **Ketua Penyunting :** Drs. Suwanto Adhi, SU ; **Sekretaris Penyunting :** Agus Naryoso, S.Sos ; **Penyunting Pelaksana :** Dra. Hartuti. P, MPA - Drs. Tri Cahyo Utomo, MA - Gr. Turnomo Rahardjo - Dra. Rodhiyah, SU ; **Penyunting Ahli :** Prof. Dr. Y. Warella, MPA (Undip) - Prof. Dr. Sudharto PH, MES (Undip) - Dr. Ari Pradhanawati, MS (Undip) - Prof. Dr. Roger Page (USA) - Dr. Peter Suwarno (USA) - Dr. Dedy Nur Hidayat (UI) ; **Tata Usaha :** Tri Wardoyo, S.E - Staf Tata Usaha Fisip - Undip;

Alamat :

MPIIS Forum Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo SH. No. 1 Semarang Telp. (024) 8442532, 8414513
Fax. (024) 8449629 mad : mpiis - forum@usa.net

Sumbangan Tulisan :

Redaksi menerima sumbangan tulisan/foto yang relevan dengan tema atau topik pada setiap penerbitan, Setiap foto haruslah disertai dengan foto copy identitas yang jelas. Setiap artikel yang dikirimkan menjadi hak sepenuhnya dari redaksi untuk mengedit dan menampilkannya

PETA SUARA DPRD JAWA TENGAH DARI PEMILU KE PEMILU (Voting Map of The Central Java Local Parliament Election to Election)

Oleh: Ari Pradhanawati

Abstract:

Voting map of the Central Java Local Parliament from election to election has shown that central java remains strong base to nationalist political party yet still gives open opportunity to the religious ones. Descriptive analysis in the method to analyse the study of vote mapping and parties's seat that had been gathered according to general election report in 1999, 2004, and 2009. The report showed that voting map of the Central Java Local Parliament from election in 1999, 2004, and 2009 had been dominated by PDIP, as if it is still hard to be broken by the masive Demokrat, Meanchile, Golkar popularity seemed to be decreased, domination of PKB is getting down, and fame of PPP has started to fall. PAN seemed to be able keeping their seats in the local parliament. Demokrat's seat has raised up and succeed in changing Golkar and PKB, but still away behind PDIP. PKS remains a middle party though it has changed by the entrance of three new parties which are Gerindra, Hanura, and PKNU as the only party that did not pass parliamentary threshold. Voting map in the Central Java Local Parliament from election to election could be a path step to set up a better and well prepared strategy for the next Governor Election in 2013 and General Election in 2014.

Keywords: Voting map, election, political party

PENDAHULUAN

KRISIS era globalisasi yang saat ini melanda di segala sisi kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari dan hampir dirasakan akibatnya diseluruh diseluruh jagad bumi ini. Namun, krisis tersebut tidak menyurutkan kita dalam berdemokrasi terutama dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2009 yang kegiatan kampanyenya sudah dimulai sejak bulan Juli 2008 dan mulai semarak setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 214 UU Nomor 10 tahun 2008, bahwa penetapan calon terpilih tidak berdasarkan nomor urut tetapi berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Sejak saat itulah, iklan politik yang dilakukan para calon anggota legislatif (caleg) semakin gencar dilakukan untuk menjangkir preferensi publik dan iklan politik menjadi primadona atau lahan yang subur bagi bisnis periklanan. Bahkan riset AC Nielsen menunjukkan, dana iklan politik tahun 2008 mencapai Rp. 2,208 triliun atau meningkat sebesar 66 % jika dibandingkan tahun 2007 yang hanya mencapai Rp. 1,327 triliun. Belanja politik tersebut belum termasuk untuk kegiatan kampanye di media cetak (koran dan majalah), media elektronik (televisi dan radio) termasuk untuk membantu konstituen dalam bentuk natura (sembako, uang saku, makan, minum, dll). Dengan demikian Pemilu 2009 ternyata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pergerakan ekonomi di sektor riil atau dengan makna lain sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 2009 cukup berarti.

Gencarnya iklan yang dilakukan para caleg ternyata tidak diikuti dengan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas bahkan cenderung menjadi karut marut karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bekerja secara profesional. Meminjam istilah Anas Urbaningrum (2004:12), KPU itu merupakan sebuah institusi yang sangat penting dalam konteks perubahan politik di era multi partai, sehingga menjadi wajar jika masyarakat berharap kepada KPU untuk memanggul dan menjadi kompas menuju demokratisasi yang sehat.

Jika ditelisik lebih lanjut, penyelenggaraan Pileg 2009 dapat dikatakan legitimasinya sangat rendah dibandingkan Pileg 2004, bahkan paling rendah mutunya dibandingkan Pileg 1999. Bukti empirisnya, banyak pemilih yang tidak terdaftar bahkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) semakin blunder karena tidak ada satupun lembaga (DPR, Depdagri dan KPU) yang mau bertanggung jawab sehingga menyebabkan banyak pemilih terpaksa menjadi golput (golongan luput) secara administratif. Termasuk jadwal kampanye terbuka berubah sampai empat kali, sehingga membingungkan parpol dalam penjadwal ulang dan menimbulkan kecurigaan bahwa KPU hanya menguntungkan parpol tertentu. Tertukarnya surat suara antar daerah pemilih (dapil) termasuk masalah yang krusial dan KPU justru mengambil tindakan yang melanggar hukum, yaitu jika surat suara yang tertukar itu dicentang maka dianggap sah dan suaranya diberikan parpol. Hal ini jelas

bertentangan dengan prinsip suara terbanyak karena setiap dapil mempunyai surat suara sendiri yang terdiri dari gambar parpol, nomor urut dan nama caleg, tentu ini sangat merugikan suara caleg. Dalam kasus ini KPU sudah melanggar UU no. 10/2008 Pasal 288 karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai.

Tidak adanya bimbingan teknis dan simulasi mengenai tata cara perhitungan suara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga perhitungan suara menjadi kacau dan lambat. Kondisi ini diperparah oleh sumber daya manusia dan skill dari KPPS sangat minim dan sulit menterjemahkan angka-angka yang harus dimasukkan dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara untuk DPR, DPD, DPRD provinsi DPRD kabupaten/kota. Hal ini juga diperkuat dengan dihapusnya penghitungan suara ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa/kelurahan. Implikasi dari lambannya penghitungan suara juga diwarnai berbagai macam kecurangan sehingga muncul ketidakpuasan dari parpol dan caleg. Pengumuman diperoleh suara dan kursi secara nasional pada tanggal 9 Mei 2009, hanya dibacakan saja tanpa ada juridiformal berupa keputusan KPU dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara per provinsi per dapil. Bahkan minus enam kecamatan di kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara yang masih melakukan penghitungan suara ulang dan Papua yang data rekapitulasinya berbeda antar data KPU dengan saksi. Bahkan saksi pun juga tidak menerima catatan pelaksanaan hasil penghitungan.

Implikasi dari karut marutnya Pileg 2009 menjadi salah satu penyebab jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 49.677.076 (29,01%) lebih besar dibandingkan Pileg 2004 sebesar 23.580.030 (15,93%). Ini dikarenakan banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak berada ditempat/berada ditempat lain atau banyak pemilih yang tidak mau/tidak bisa mengurus formulir A5 untuk pindah TPS. Sedangkan jumlah surat suara tidak sah sebesar 17.488.581 (14,38%) lebih besar dibandingkan Pileg 2004 yang hanya sebesar 10.957.925 (8,81%), ini menandakan bahwa sosialisasi teknis tata cara pemberian suara yang dilakukan oleh KPU kurang maksimal. Kondisi tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Sundhaussen (dalam Anas Urbaningrum), 2004:18) tentu bertentangan karena menurut Sundhaussen demokrasi sebagai sistem politik memiliki kriteria

- (1) dijaminnya hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu yang diadakan secara berkala
- (2) setiap warga negara berhak mendapatkan informasi yang akurat.

Terlepas dari karut marutnya penyelenggaraan Pemilu 2009 yang unpredictable procedures and unpredictable result, maka hasil pemilu tersebut harus diterima dalam kondisi apa adanya dan tentu jauh dari profesionalitas. Dengan demikian, untuk melihat hasil pemilu khususnya di Jawa Tengah, maka diperlukan sebuah kajian yang komprehensif untuk melihat peta suara parpol yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Jawa Tengah dalam tiga kali pemilu, karena konstelasi politiknya dari pemilu ke pemilu selalu ada perubahan, baik perubahan dalam perolehan suara maupun dalam perolehan kursi termasuk perubahan jumlah parpol. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan pula perubahan konstelasi politik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di amsa yang akan datang. Hal itu sejalan dengan pemikiran W.F Ogburn (1986) bahwa perubahan disatu pihak akan menyebabkan perubahan di pihak lain.

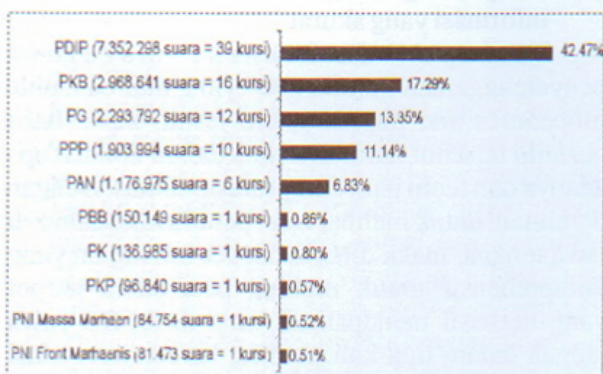
Kajian ini akan menganalisis sejauhmana peta suara DPRD Jawa Tengah dari pemilu ke Pemilu?

PEMBAHASAN

Pemilu 2009 yang diikuti 44 parpol yang terdiri dari 14 parpol baru yang baru pertama kali menjadi peserta Pemilu 2009 dan 17 parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak lolos ambang batas suara (electoral threshold) dan sisanya 7 parpol yang sudah lolos electoral threshold, menunjukkan hasil semakin menguatnya dominasi parpol yang beraliran nasionalis khususnya di Jawa Tengah. Dari tiga kali pemilu (lihat Tabel 1, 2 dan 4) PDI Perjuangan (PDIP) masuk bertahan di urutan pertama dan menjadi lumbung subur sejak Pemilu 1999, tetapi perolehan suaranya mulai tergerus seiring dengan bertambahnya parpol-parpol baru, baik yang beraliran nasionalis maupun yang beraliran Islam serta naiknya popularitas parpol baru lainnya.

Untuk melihat kekuatan dan peta perolehan suara dari masing-masing parpol peserta pemilu di tiga kali Pemilu Legislatif 1999, 2004 dan 2009 dapat dijelaskan melalui Tabel berikut ini.

Tabel 1
Perolehan Suara & Kursi DPRD Jateng
Pemilu 1999



Sumber : Data sekunder, diolah, 2009.

Perolehan Suara dan Kursi DPRD Jawa Tengah pada Pemilu 1999 dengan provinsi sebagai daerah pemilihan (35 kabupaten/kota) dapat digambarkan sebagai berikut, jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 18.720.597 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 17.663.274 (94,35%) dan jumlah suara sah 17.189.225 (97,32%), ada 10 parpol yang memperoleh kursi dari 48 parpol peserta pemilu (PDIP, PKB, P.Golkar, PPP, PAN, PBB, PK, PKP, PNI Massa Marhaen dan PNI Front Marhaenisme).

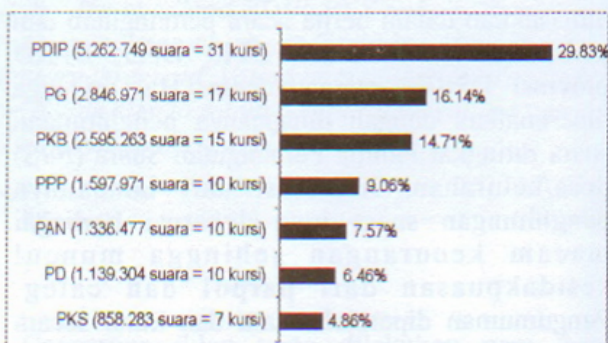
Pemilu 1999 merupakan era reformasi dan era kebangkitan PDIP sehingga sangat wajar jika PDIP mendominasi kursi dewan sebesar 39 kursi (42,47%) disusul PKB dengan 16 kursi (17,29%). Sedangkan Partai Golkar harus mengakui keunggulan PDIP dan PKB dengan memperoleh 12 kursi (13,35%). Partai Golkar sekalipun sedang terpuruk tetapi perolehan suaranya berada di tiga besar, disusul oleh PPP di urutan keempat memperoleh 10 kursi (11,14%) dan PAN sebagai partai baru atau partai dengan julukan partai reformis mampu berada di urutan kelima dengan perolehan suara 1.176.975 (6 kursi). Sedangkan partai baru lainnya seperti PBB, PK, PKP, PNI Massa Marhaen dan PNI Front Marhaenis masing-masing memperoleh satu kursi dari sisa kursi yang dihitung berdasarkan ranking suara terbanyak.

Sangat wajar jika hasil Pemilu 1999 kursi DPRD didominasi PDIP dan kondisi tersebut semakin menguatkan bahwa Jawa Tengah menjadi lumbung atau basis kaum nasionalis sekalipun dibayangi oleh parpol pendatang baru (PKB) yang berada di posisi kedua, karena Jawa Tengah selain menjadi basis nasionalis juga merupakan lumbung parpol yang beraliran Islam. Suara Partai Golkar jelas pecah dan banyak kadernya yang hengkang ke parpol-parpol lain. Partai Golkar yang sudah berkuasa selama 30 tahun-an harus puas berada di

posisi ketiga, posisi yang cukup aman dibandingkan suara PPP.

Tabel 2 berikut ini menggambarkan peta suara dan perolehan kursi di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2004 yang merupakan pemilu beda karena memakai sistem baru yaitu menggunakan dapil untuk DPRD provinsi yaitu kabupaten/kota yang bervariasi jumlahnya bergantung pada jumlah penduduk dan masing-masing dapil mendapat alokasi kursi antara 3-12 kursi DPRD provinsi yang diperebutkan sebanyak 100 kursi.

Tabel 2
Perolehan Suara & Kursi DPRD Jateng
Pemilu 2004



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2009

Hasil Pemilu 2004 menggambarkan jumlah pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 22.791.184 orang, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 19.038.093 orang (83,53%) dan jumlah suara sah 17.644.333 (92,68%), menghasilkan 7 parpol dari 24 parpol peserta pemilu yang berhak duduk di DPRD Jawa Tengah yaitu PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, PAN, Partai Demokrat dan PKS.

Peta politik di Jawa Tengah masih terasa merahnya sekalipun kursi PDIP menurun yaitu hanya memperoleh 31 kursi (29,83%) dibandingkan Pemilu 1999 (39 kursi) tetapi masih tetap berada di urutan pertama dengan persebaran perolehan kursinya merata di 10 dapil. Menurunnya suara PDIP seiring dengan menguatnya kembali pamor Partai Golkar hingga memperoleh 17 kursi (16,14%) berada di posisi kedua dibandingkan Pemilu 1999 (12 kursi) dengan persebaran kursi di 10 dapil telah berhasil menggeser posisi PKB. Turunnya suara PDIP juga disebabkan menguatnya suara PAN yang kursinya naik menjasi 10 kursi (7,57%) dibandingkan Pemilu 1999 (6 kursi) berada di posisi kelima yang tersebar di 9 dapil (kecuali dapil 2). Suara PDIP yang menurun dapat pula disebabkan munculnya partai pendatang baru yang sama sekali tidak diperhitungkan yaitu Partai Demokrat di bawah bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akhirnya terpilih menjadi Presiden RI

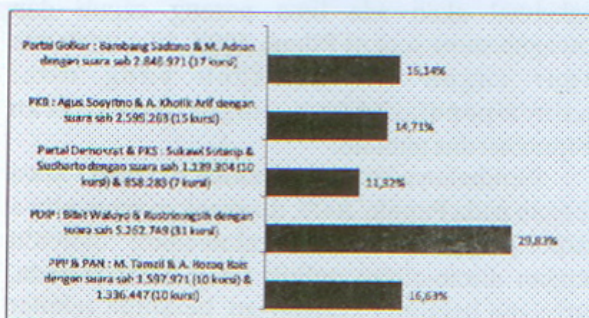
ke-6. Partai Demokrat langsung memperoleh 10 kursi (6,46%) yang tersebar di 10 dapil berada di posisi keenam. Demikian pula dengan suara PKS, dukungannya semakin menguat dari 1 kursi di Pemilu 1999 menjadi 7 kursi (4,86%) di Pemilu 2004 yang tersebar di 7 dapil (kecuali dapil 7,8 dan 10) berada di posisi ketujuh juga menjadi penyebab menurunnya kursi PDIP. Sedangkan perolehan kursi PKB menurun menjadi 15 kursi (14,71%) yang tersebar di 9 dapil (kecuali dapil 4) berada di posisi ketiga. Perolehan suara PPP juga menurun dibandingkan Pemilu 1999, namun masih tetap berada di posisi keempat dan jumlah perolehan kursinya juga masih tetap 10 kursi (9,06%) yang tersebar di 8 dapil (kecuali dapil 4 dan 5).

Peta perolehan suara dan kursi di DPRD Jawa Tengah menjadi modal persyaratan parpol dalam mengajukan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2008 yang lalu, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 59 Ayat (2), bahwa parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah bersangkutan (lihat Tabel 3).

Tabel 3.

Jumlah Suara Sah Parpol di DPRD Jateng yang Berhak

Mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilgub 2008



Sumber : Data sekunder, diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dijelaskan bahwa ada tiga parpol yang dapat mengusung cagub dan cawagub tanpa harus bergabung dengan parpol lain, yaitu PDIP dengan 31 kursi (29,83%) mengusung pasangan cagub Bibit Waluyo (Mantan Pangdam IV Diponegoro) dan cawagub

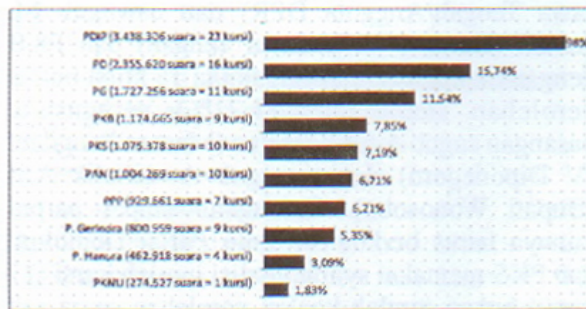
Rustriningsih (Bupati Kebumen). Partai Golkar dengan 17 kursi (16,14%) mengusung pasangan cagub Bambang Sadono (Ketua DPD Golkar Jawa Tengah/Anggota DPR) dan cawagub M. Adnan (Ketua PWNU Jawa Tengah) dan PKB dengan menggunakan persyaratan 15 kursi bukan perolehan suara sah (14,71%) mengusung pasangan cagub Agus Soeyitno (Mantan Pangdam IV Diponegoro) dan cawagub A. Kholik Arif (Bupati Wonosobo). Sedangkan empat parpol lainnya harus berkoalisi, yaitu Partai Demokrat dan PKS memakai syarat koalisi jumlah kursi (17 kursi) bukan jumlah koalisi perolehan suara sah (11,32%). Persyaratan dalam pengajuan cagub dan cawagub dari koalisi parpol tersebut, Partai Demokrat mempunyai 10 kursi berkoalisi dengan PKS yang mempunyai 7 kursi mengusung pasangan cagub Sukawi Sutrisno (Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah/Walikota Semarang) dan cawagub Sudharto (Anggota DPD asal Jawa Tengah). Demikian pula PPP yang mempunyai 10 kursi berkoalisi dengan PAN yang mempunyai 10 kursi atau mempunyai perolehan suara sah sebesar 16,63% mengusung pasangan cagub M. Tamzil (Bupati Kudus) dan cawagub A. Rozaq Rais (Ketua DPD PAN Jawa Tengah).

Pilgub 2008 dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 25.855.542 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 15.116.390 orang (58,46%) dan jumlah suara sah sebesar 14.007.042 dimenangkan pasangan Bibit Waluyo dan Rustriningsih yang diusung oleh PDIP dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 6.084.261 (43,44%). Kemenangan PDIP pada Pilgub 2008 semakin menguatkan pamor partai berlambang banteng bermoncong putih itu menguasai ajang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) di 18 kabupaten/kota dan 15 orang diantaranya menjabat untuk kali kedua serta satu diantaranya akhirnya terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Tabel 4 berikut ini menggambarkan hasil peta perolehan suara dan kursi DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2009, yaitu terdiri dari 10 dapil untuk DPRD provinsi dengan alokasi kursi antara 3-12 kursi dan jumlah kursi DPRD provinsi yang diperebutkan sebanyak 100 kursi, dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT 26.190.629 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 18.662.737 (71,26%) dan jumlah suara sah sebesar 14.962.060. Penetapan calon terpilih hasil Pemilu 2009 sesuai dengan keputusan MK yaitu berdasarkan suara terbanyak.

Tabel 4.

Perolehan Suara & Kursi DPRD Jateng Pemilu 2009



Sumber : Data sekunder, diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dijelaskan, peta perolehan suara dan kursi hasil Pemilu 2009 untuk DPRD Jawa Tengah telah mengubah konstelasi, yaitu terdapat 10 parpol yang berhasil memperoleh kursi dari 44 parpol peserta pemilu dengan komposisi 9 parpol lolos *parliamentary threshold* (PT) dan ada satu parpol yang tidak lolos PT yaitu PKNU.

Pamor PDIP mulai meredup sejak Pemilu 2004 karena perolehan suara terus menurun. Hasil Pemilu 2009 hanya memperoleh 23 kursi (22,98%), menyebar di 10 dapil, berkurang 8 kursi dibandingkan Pemilu 2004 dan turun 16 kursi dibandingkan Pemilu 1999, tetapi masih tetap berada di posisi pertama dan dukungan dari pemilih masih cukup kuat, buktinya perolehan suara Partai Demokrat naik dengan 16 kursi (15,74%) yang menyebar di 10 dapil berada di posisi kedua terpaut 1.082.686 suara dengan PDIP. Partai Demokrat berhasil menggeser kekuatan Partai Golkar yang berada di posisi ketiga dengan 11 kursi (11,54%) menyebar di 10 dapil. Perolehan kursi Partai Golkar menurun cukup tajam (6 kursi) dibandingkan Pemilu 2004 dan turun 1 kursi dibandingkan hasil Pemilu 1999. Implikasinya, Partai Golkar tidak dapat mengajukan sendiri cagub dan cawagub pada Pilgub 2013. Perolehan suara PKB turun di posisi keempat dengan perolehan kursi sebanyak 9 (7,85%) turun 6 kursi dibandingkan Pemilu 2004 dan turun 7 kursi pada Pemilu 1999, menyebar di 8 dapil (kecuali dapil 4 dan 5). Turunnya dukungan pemilih ke PKB karena adanya kepemimpinan ganda dan perpecahan di tubuh PKB yaitu antara kubu PKB Gus Dur dengan kubu PKB Muhaimin. Maknanya, kekuatan PKB Muhaimin di Jawa Tengah masih cukup kuat walaupun dalam kondisi perpecahan dan di tengah-tengah lahirnya parpol baru yang berhaluan Islam maupun yang beraliran nasionalis. Sekalipun PKB berada di posisi

keempat tetapi perolehan kursinya lebih banyak PKS yang mendapatkan 10 kursi (7,19%) bertambah 3 kursi dibandingkan Pemilu 2004 dan bertambah 9 kursi dibandingkan Pemilu 1999, yang menyebar di 10 dapil berada di posisi kelima. Hal itu disebabkan PKB mempunyai sisa suara tetapi tidak bisa mendapatkan tambahan kursi. Sedangkan PAN pada Pemilu 2004 berada di posisi kelima sekarang berada di posisi keenam tetapi jumlah kursinya masih tetap 10 kursi yang menyebar di 10 dapil bertambah 1 dapil dibandingkan Pemilu 2004, yaitu di dapil 2 dan lebih baik dibandingkan Pemilu 1999 yang hanya memperoleh 6 kursi.

Selanjutnya PPP memperoleh 7 kursi (6,21%) hanya menyebar di 6 dapil (kecuali dapil 4, 5, 7 dan 8). Posisi PPP berada di posisi ketujuh, turun 3 kursi dibandingkan Pemilu 1999 dan 2004 yang berada di posisi keempat. Pemilu 2009 memberi kesempatan kepada tiga parpol baru, yakni Partai Gerindra yang berhasil memperoleh 9 kursi (5,35%) tersebar di 9 dapil (kecuali dapil 9), menduduki posisi kedelapan. Kemudian disusul Partai Hanura dengan perolehan kursi sebanyak 4 (3,09%) tersebar di 4 dapil (dapil 2, 3, 5 dan 10) berada di posisi kesembilan. Terakhir, PKNU yang hanya memperoleh 1 kursi (1,83%), menang di dapil 6 menempati posisi kesepuluh.

Hasil Pemilu 2009 dapat menggambarkan peta kekuatan 10 parpol dalam Pilgub 2013 mendatang, hanya PDIP dan Partai Demokrat yang bisa mengajukan cagub dan cawagub tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain karena sudah memenuhi syarat memperoleh minimal 15 kursi di DPRD, sedangkan 8 parpol lainnya harus saling berkoalisi. Kemungkinan pada Pilgub 2013 maksimal akan ada lima pasang cagub dan cawagub sama seperti Pilgub 2008. Jika tidak ada figur cagub dan cawagub yang nilai jualnya/popularitasnya tinggi maka akan berpotensi dua putaran.

Berubahnya konstelasi politik di DPRD Jawa Tengah pada Pemilu 2009, disebabkan munculnya parpol-parpol baru serta calon-calon individu dengan aliran-aliran politik yang berbeda-beda, dari yang beraliran keagamaan, beraliran sekuler maupun beraliran campuran. Masyarakat pun menyikapi berbagai parpol serta individu dengan aliran politik mereka yang berlain-lainan itu terutama untuk menjatuhkan pilihan, tentu mempunyai preferensi sendiri-sendiri. Preferensi tersebut mungkin didasarkan pertimbangan kesamaan agama, identifikasi kepartaian, kalkulasi untung-rugi ataupun pertimbangan lainnya (Ari dan Tri, 2009: 26).

PENUTUP

Peta suara DPRD Jawa Tengah dari pemilu ke pemilu yaitu Pemilu 1999, 2004 dan 2009 masih didominasi oleh PDIP, artinya PDIP masih sanggup memerahkan dan menjadikan Jawa Tengah menjadi lumbung subur seolah sulit ditembus oleh Partai Demokrat yang semakin agresif. Sementara itu pamor Partai Golkar melemah, gejalanya dilihat dari perolehan suaranya turun, naik, turun dalam tiga kali pemilu. Adapun dominasi PKB di Jawa Tengah semakin tergerus selama pamornya juga mulai meredup di Pemilu 2009. Posisi PAN yang mampu menjaga suaranya menempatkan PAN sebagai parpol papan tengah. Birunya Partai Demokrat mampu melukis peta suara Jawa Tengah menyaingi birunya PAN, Golkar dan PKB, tetapi masih jauh di bawah PDIP. Demikian pula dengan PKS perolehan suaranya menunjukkan arah yang cukup signifikan dalam tiga kali pemilu tetapi masih termasuk dalam parpol papan menengah. Pemilu 2009 konstelasi politik di DPRD Jawa Tengah berubah dengan masuknya tiga parpol baru yaitu Partai Gerindra dan Partai Hanura serta satu-satunya parpol yang tidak lolos *parliamentary threshold* yaitu PKNU.

Hasil Pemilu 1999, 2004 dan 2009 di Jawa Tengah menunjukkan bahwa Jawa Tengah masih merupakan basis yang kuat bagi parpol yang beraliran nasionalis tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi parpol yang berhaluan Islam. Ke depan, peta perolehan suara dan kursi di Jawa Tengah bisa dijadikan pijakan untuk mempersiapkan strategi Pilgub 2013 dan Pemilu 2014 mendatang agar lebih siap dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Urbaningrum, Anas. 2004. *Melamar Demokrasi : Dinamika Politik Indonesia*. Penerbit Republika. Jakarta.

_____. 2004. *Islam Demokrasi : Pemikiran Nurkholis Madjid*. Penerbit Republika. Jakarta.

Pradhanawati, Ari & Tri Cahyo Utomo. 2009. *Pemilu dan Demokrasi*. Penerbit FISIP-UNDIP & JALANMATA Semarang.

NON BUKU :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.